

BAB 2

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Program Keluarga Harapan (PKH)

2.1.1.1 Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu keluarga miskin dan rentan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. PKH memberikan bantuan finansial secara langsung kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu dengan tujuan meringankan beban finansial keluarga tersebut dan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, program ini memiliki elemen pendampingan, termasuk pendidikan dan kesehatan. Keluarga penerima manfaat diharuskan memenuhi persyaratan tertentu, seperti mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah dan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin (Collins et al., 2021).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin (KM) yang telah dipilih sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, PKH harus menjadi program unggulan (Li, 2009). Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan dan ketentuan dan memenuhi tanggung jawabnya. Secara internasional, program jenis ini disebut Program Bantuan Tunai Bersyarat atau *Program Transfer Tunai Bersyarat* (CCT). Kehadiran di fasilitas pendidikan, seperti anak-anak usia sekolah, atau fasilitas kesehatan, seperti bayi dan ibu hamil, dapat menjadi salah satu contoh persyaratan tersebut (Pancawangi, 2019 dalam (Muliana et al., 2021)).

Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan akan meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan dasar dan taraf hidup mereka secara keseluruhan. Program ini lebih dari sekadar bantuan finansial; itu adalah alat yang membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dan berkontribusi pada pembangunan. Melalui PKH, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memerangi kemiskinan dan

memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan (Nugraha et al., 2024; 5).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial bersyarat (*Conditional Cash Transfer*) yang dirancang untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin serta mendorong peningkatan kualitas hidup melalui akses yang lebih baik pada layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. PKH tidak hanya berperan sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga sebagai strategi pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan secara berkelanjutan.

Menurut Supriatna (1997) dalam Tamboto, Manongko (2019; 25), kemiskinan adalah keadaan yang memiliki banyak keterbatasan yang terjadi tanpa kehendak individu yang bersangkutan. Apabila tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi, serta kesejahteraan hidupnya rendah, seseorang dianggap miskin, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan memiliki banyak aspek, yang berarti tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi seperti ketiadaan pendapatan dan harta (juga dikenal sebagai ketiadaan pendapatan dan harta), tetapi juga berkaitan dengan banyak aspek lainnya. Ini berarti bahwa bukan hanya komponen ekonomi yang memengaruhi tingkat kemiskinan suatu negara, tetapi juga komponen non-ekonomi (Takaredase et al., 2019). Kemiskinan memiliki keterkaitan yang erat dengan akses pendidikan anak. Anak-anak dari keluarga miskin sering menghadapi hambatan dalam melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya, kurangnya fasilitas belajar, serta rendahnya dukungan lingkungan. Hal ini mengakibatkan tingginya angka putus sekolah, rendahnya prestasi akademik, dan terbatasnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2.1.1.2 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) menurut (Guna et al., 2012) untuk menurunkan jumlah kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah kebiasaan yang tidak berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan kelompok yang paling miskin. Untuk

mempercepat pencapaian tujuan *Millennium Development Goals* (MDGs), tujuan ini sangat terkait. Selain itu, PKH ini masih memiliki beberapa tujuan.

Tujuan khusus Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) / Keluarga Sangat Miskin (KSM)
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) /Keluarga Sangat Miskin (KSM); dan
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/ Keluarga Sangat Miskin (KSM).

Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah perilaku peserta PKH yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan mereka. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk bantuan sosial bersyarat yang memiliki tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan bagi keluarga yang miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH merupakan salah satu langkah dalam mengatasi kemiskinan serta ketidaksetaraan dengan cara meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial demi memperbaiki kualitas hidup keluarga-keluarga yang berada dalam kondisi miskin dan rentan. Bantuan sosial PKH diberikan dalam bentuk uang kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi dan/atau rentan terhadap dampak sosial (Takaredase et al., 2019).

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan, menghentikan siklus kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah kebiasaan yang tidak membantu mereka yang kurang mampu. Selain itu, tujuan program ini adalah untuk mendorong percepatan pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan-tujuan ini termasuk penghapusan kemiskinan, pemberantasan kelaparan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan kesehatan gender yang baik, air bersih dan sanitasi, pertumbuhan ekonomi inklusif, infrastruktur yang kuat, dan keberlanjutan konsumsi dan produksi. Selain itu, PKH juga berusaha untuk mengurangi risiko

berencana, melestarikan ekosistem laut dan darat, memperkuat keadilan, perdamaian, dan organisasi yang kuat, dan mendorong kerja sama global untuk mencapai tujuan pembangunan.

2.1.1.3 Syarat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan

Untuk mendapatkan bantuan tunai, penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pedoman Umum PKH (2009:19) dan berkomitmen untuk berpartisipasi dalam program pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Persyaratan ini termasuk:

a. Kesehatan

Menurut Pratomo (1985:55–56), kesehatan merupakan modal yang sangat berharga bagi individu maupun masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Kurangnya perhatian terhadap aspek kesehatan dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), setiap penerima manfaat wajib memenuhi persyaratan kesehatan yang telah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan. Persyaratan tersebut meliputi pemberian vitamin A kepada anak usia 0–6 tahun, menerima imunisasi atau vaksinasi lengkap, serta melakukan penimbangan berat badan secara rutin setiap bulan. Selain itu, anak juga diwajibkan menjalani pemeriksaan berat badan secara berkala dan memperoleh vitamin A sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Bagi anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pemberian vitamin A juga menjadi bagian dari upaya pemenuhan persyaratan kesehatan dalam program tersebut.

b. Pendidikan

Menurut Purwanto, Nanang (2014: 27), pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu melalui kegiatan pengajaran dan pelatihan yang berlangsung sepanjang hidup di berbagai lingkungan belajar untuk mempersiapkan manusia untuk memainkan peran yang sesuai. Ini semua menunjukkan betapa pentingnya pendidikan karena memberi generasi berikutnya perspektif hidup. Pendidikan juga merupakan proses timbal balik antara individu

dan lingkungan mereka, yang ditandai dengan pengembangan potensi setiap individu untuk mencapai tujuan hidupnya dalam masyarakat.

Pendidikan menurut Undang-Undang SISDIKNAS no. 20 tahun 2003 adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki keikatan spiritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan bermasyarakat, dan akhlak mulia. Untuk mencapai tujuan pendidikan, pelayanan harus didukung.

Anak-anak yang menerima bantuan PKH harus pergi ke sekolah, baik formal maupun non-formal, karena sekolah berfungsi sebagai tempat pendidikan. untuk mempersiapkan seseorang untuk menjadi bagian dari masyarakat, bangsa, dan dunia di masa depan, menurut Purwanto, Nanang (2014:77). Untuk mencapai tujuan nasional, sekolah diharapkan dapat berperan dalam mengembangkan potensi anak-anak, meningkatkan kualitas hidup, dan menghargai martabat manusia. Sekolah memainkan peran penting dalam masyarakat karena membantu anak mempersiapkan diri untuk hidup, mencerminkan keadaan masyarakat, memberikan pembinaan, dan menyediakan lingkungan yang berfungsi sebagai pengganti keluarga dan orang tua bagi pendidik.

Berdasarkan Pedoman Umum PKH (2009:19), anak-anak yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) wajib memenuhi persyaratan pendidikan dengan tingkat kehadiran minimal 85% dari total hari belajar setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Peserta PKH yang berusia 7 hingga 15 tahun harus terdaftar pada satuan pendidikan dasar, baik formal maupun nonformal, seperti SD/MI/SDLB/Paket A maupun SMP/MTs/SMPLB/Paket B, termasuk SMP/MTs terbuka, serta mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran sekurang-kurangnya 85%. Ketentuan ini juga berlaku bagi anak usia 5–6 tahun yang telah terdaftar dan mengikuti pendidikan di sekolah dasar. Bagi anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan reguler, mereka dapat bersekolah di SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan anak yang tidak mampu mengikuti pendidikan reguler dapat menempuh pendidikan di SDLB atau SMPLB. Selain itu, peserta PKH yang belum menyelesaikan pendidikan dasar wajib didaftarkan ke

satuan pendidikan formal maupun nonformal, seperti SD/MI, SMP/MTs, Paket A, atau Paket B. Untuk anak peserta PKH yang bekerja, menjadi pekerja anak, atau telah putus sekolah dalam jangka waktu tertentu, diperlukan program remedial sebagai upaya persiapan kembali ke sekolah. Program remedial tersebut dapat berupa layanan rumah singgah atau shelter yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan bagi anak jalanan maupun pekerja anak. Dengan terpenuhinya persyaratan pendidikan dan kesehatan secara berkelanjutan, keluarga miskin yang menjadi peserta PKH berhak memperoleh bantuan secara rutin dan berkesinambungan sesuai ketentuan program.

2.1.1.4 Kriteria Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

- a. Kriteria komponen Pendidikan:
 - 1) Anak usia sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah atau sederajat
 - 2) Anak sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah atau sederajat
 - 3) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun
- b. Kriteria komponen Kesehatan:
 - a) Ibu hamil dan menyusui
 - b) Anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial:
 - a) Berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun atau lanjut usia
 - b) Penyandang disabilitas berat

2.1.1.5 Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

- a. Hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH
KPM PKH berhak mendapatkan:
 - 1) Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)
 - 2) Pendampingan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)
 - 3) Pelayanan di fasilitas Kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan sosial
 - 4) Program bantuan komplementer di bidang Kesehatan Pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

b. Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)

Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) pada kondisi normal dari:

- 1) Komponen Kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksa kesehatan pada fasilitas/layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan.
- 2) Komponen Pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan Tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hasil belajar efektif.
- 3) Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia dan atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali.
- 4) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan.
- 5) Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajibannya kecuali jika terjadi keadaan kahar (force majeure).
- 6) KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi. Mekanisme sanksi ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen.

2.1.1.6 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah kebijakan bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini tidak hanya berkonsentrasi pada penyediaan bantuan, tetapi juga mendidik keluarga penerima manfaat untuk menjadi lebih mandiri dan menyadari pentingnya pendidikan anak. Secara umum, bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan oleh pendamping, pemerintah daerah, dan keluarga penerima manfaat memengaruhi keberhasilan program.

a. Bantuan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan pendidikan dalam Program Keluarga Harapan adalah bentuk dukungan pemerintah kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Bantuan ini diberikan agar anak-anak dari keluarga penerima manfaat tetap dapat bersekolah tanpa terhambat oleh keterbatasan ekonomi mereka. Dalam konteks perlindungan sosial, bantuan pendidikan dianggap sebagai alat untuk menjaga keberlanjutan pendidikan anak-anak sekaligus menghentikan rantai kemiskinan antar generasi (Martsha, F. 2024).

Dalam Program Keluarga Harapan Khalifah, S. N., & Basar, G. G. K. (2023) mengatakan bantuan pendidikan biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah dasar seperti seragam, alat tulis, buku, transportasi, dan perlengkapan belajar lainnya. Ini membantu keluarga mengurangi pengeluaran mereka sehingga uang yang mereka miliki dapat dialokasikan secara lebih proporsional. Oleh karena itu, program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial kepada anak-anak, tetapi juga meningkatkan akses mereka terhadap layanan pendidikan.

Bantuan pendidikan sangat penting untuk meningkatkan partisipasi anak-anak usia sekolah, terutama bagi keluarga prasejahtera yang rentan putus sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial bersyarat dari Program Keluarga Harapan meningkatkan partisipasi siswa, terutama di sekolah dasar dan menengah pertama. Karena sebagian kebutuhan sekolah telah terpenuhi, bantuan ini mendorong orang tua untuk memberikan lebih banyak perhatian pada pendidikan anak mereka (Khalifah, S. N., & Basar, G. G. K. 2023).

Bantuan pendidikan tidak hanya berdampak pada lamanya sekolah beroperasi, tetapi juga memengaruhi cara keluarga penerima manfaat melihat dunia. Orang tua menjadi lebih sadar bahwa pendidikan adalah investasi penting untuk masa depan anak mereka. Penelitian tentang makna pendidikan bagi penerima PKH menunjukkan bahwa keluarga dimotivasi untuk mempertahankan anak mereka di sekolah sebagai bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka di masa mendatang (Prasasti, R., & Harianto, S. 2018)

Berdasarkan uraian tersebut, bantuan pendidikan dalam Program Keluarga Harapan dapat dipahami sebagai salah satu komponen utama dalam mendukung

pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. Bantuan pendidikan melihat sejauh mana program telah membantu keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak serta mendukung keberlangsungan pendidikan mereka.

b. Kewajiban Pendidikan

Kewajiban pendidikan dalam Program Keluarga Harapan merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh keluarga penerima manfaat. Kewajiban ini menekankan bahwa anak dari keluarga penerima bantuan harus tetap terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan formal sesuai jenjang usianya. Dalam konteks ini, Program Keluarga Harapan tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan tunai, tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong perubahan perilaku keluarga dalam memprioritaskan pendidikan anak (Cahyono, S. A. T. 2018).

Rosdiana, & Atmaja, R. (2023) menyatakan secara substantif, kewajiban pendidikan mencakup kehadiran anak di sekolah, keterlibatan dalam proses pembelajaran, serta keberlanjutan pendidikan tanpa putus di tengah jalan. Keluarga penerima manfaat dituntut untuk memastikan anak hadir secara rutin sesuai ketentuan kehadiran minimal yang ditetapkan dalam program. Kewajiban ini bertujuan agar bantuan yang diberikan benar-benar mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari tingkat kepatuhan keluarga dalam memenuhi komitmen pendidikan tersebut.

Pemenuhan kewajiban pendidikan dalam Program Keluarga Harapan juga berhubungan erat dengan peran orang tua dalam pengasuhan dan pengawasan anak. Orang tua tidak hanya bertanggung jawab menyediakan kebutuhan sekolah, tetapi juga memastikan anak memiliki motivasi belajar, disiplin hadir di sekolah, dan memperoleh dukungan belajar di rumah. Dalam penelitian tersebut Sari, S. A., & Fitriani, E. (2021) menunjukkan bahwa keluarga penerima manfaat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pendidikan cenderung lebih konsisten dalam menjalankan kewajiban program. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kewajiban pendidikan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif keluarga.

Di sisi lain, pelaksanaan kewajiban pendidikan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya pemahaman orang tua, serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung proses belajar anak. Dalam beberapa kasus, bantuan yang diterima belum sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan karena adanya kebutuhan rumah tangga lain yang mendesak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pendidikan memerlukan pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal (Hidayati, R., Febrian, A., Joni, Y., & Fauzan, R. 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, kewajiban pendidikan dalam Program Keluarga Harapan dapat dipahami sebagai bentuk komitmen keluarga penerima manfaat dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak. Kewajiban pendidikan menilai sejauh mana keluarga penerima manfaat telah menjalankan tanggung jawabnya dalam memastikan anak tetap bersekolah, aktif mengikuti pembelajaran, dan melanjutkan pendidikan secara berkelanjutan.

c. Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)

Pendampingan dalam Program Keluarga Harapan merupakan proses pembinaan yang dilakukan oleh pendamping sosial kepada keluarga penerima manfaat agar program dapat berjalan sesuai tujuan. Pendamping sosial berperan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kondisi nyata di lapangan. Melalui pendampingan, keluarga penerima manfaat tidak hanya menerima informasi tentang bantuan, tetapi juga memperoleh arahan mengenai hak, kewajiban, dan pemanfaatan bantuan secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program (Husain, A., Yantu, I., & Monoarfa, V. 2025).

Menurut Nadia, I., Shodiqin, A., & Marfuah, L. L. A. (2024). Secara teknis, pendamping memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi program, memutakhirkan data penerima manfaat, memfasilitasi pencairan bantuan, serta memastikan keluarga penerima memenuhi komitmen yang telah ditetapkan, khususnya di bidang pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pendamping juga membantu keluarga memahami prosedur administrasi dan menyelesaikan kendala yang dihadapi selama

mengikuti program. Peran tersebut menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat edukatif dan solutif bagi keluarga penerima manfaat.

Dalam aspek pendidikan, pendampingan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak. Pendamping sosial memberikan motivasi kepada orang tua agar memastikan anak tetap bersekolah, hadir secara rutin, serta memperoleh dukungan belajar yang memadai di rumah. Selain itu, pendamping juga memantau kepatuhan keluarga terhadap kewajiban pendidikan sebagai salah satu syarat dalam program. Dengan adanya pendampingan yang aktif, keluarga penerima manfaat cenderung lebih memahami pentingnya investasi pendidikan bagi masa depan anak (Husain, A., Yantu, I., & Monoarfa, V. 2025).

Menurut Zulkiflimansyah, & Yamin, A. (2023). Pelaksanaan pendampingan di lapangan juga menekankan pentingnya komunikasi yang persuasif dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial keluarga penerima manfaat. Penelitian menunjukkan bahwa pendamping yang menggunakan bahasa sederhana, membangun suasana yang nyaman, serta menjalin hubungan yang dekat dengan peserta pertemuan dapat meningkatkan efektivitas penyampaian informasi. Pola komunikasi yang baik membantu keluarga lebih mudah menerima materi, memahami kewajiban, serta merasa didampingi selama menjalankan program.

Meskipun demikian, pendampingan dalam Program Keluarga Harapan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti jumlah keluarga dampingan yang banyak, keterbatasan waktu pendamping, kondisi wilayah yang sulit dijangkau, serta rendahnya partisipasi sebagian keluarga penerima manfaat. Oleh karena itu, keberhasilan pendampingan sangat bergantung pada kompetensi pendamping dalam berkomunikasi, membangun kepercayaan, dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi keluarga.

d. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) / *Family Development Session* (FDS)

P2K2 atau *Family Development Session* merupakan salah satu bentuk intervensi non-tunai dalam Program Keluarga Harapan yang bertujuan untuk

meningkatkan kapasitas keluarga penerima manfaat. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin melalui pertemuan kelompok yang difasilitasi oleh pendamping sosial. Dalam pelaksanaannya, P2K2 tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi program, tetapi juga wadah pembelajaran bagi keluarga untuk memahami pentingnya pendidikan, kesehatan, pengasuhan anak, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga (Nadia, I., Shodiqin, A., & Marfuah, L. L. A. 2024)

Secara substantif, P2K2/FDS dirancang untuk mendorong perubahan pola pikir dan perilaku keluarga penerima manfaat agar lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Materi yang diberikan dalam kegiatan ini mencakup pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan keluarga, perlindungan anak, pengelolaan keuangan, serta perencanaan masa depan keluarga. Melalui proses belajar bersama, keluarga penerima manfaat diharapkan memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam mendukung tumbuh kembang anak, termasuk keberlangsungan pendidikan mereka.

Dalam konteks pendidikan, P2K2/FDS berperan penting dalam meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya keterlibatan dalam proses belajar anak. Melalui kegiatan ini, orang tua diberikan pemahaman tentang pentingnya kehadiran anak di sekolah, pendampingan belajar di rumah, serta pola asuh yang mendukung perkembangan akademik anak. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan P2K2 mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga dalam menjalankan peran pendidikan di rumah. Dengan demikian, P2K2 tidak hanya berdampak pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada perubahan perilaku keluarga dalam mendukung pendidikan anak.

Menurut Zulkiflimansyah, & Yamin, A. (2023). Pelaksanaan P2K2/FDS di lapangan juga menjadi sarana interaksi sosial antar keluarga penerima manfaat. Dalam forum tersebut, peserta dapat saling berbagi pengalaman, permasalahan, dan solusi terkait pengasuhan maupun pendidikan anak. Interaksi ini membantu membangun rasa saling mendukung antarkeluarga serta menciptakan lingkungan belajar yang partisipatif. Pendamping sosial berperan penting dalam memastikan materi tersampaikan dengan baik serta menciptakan suasana diskusi yang aktif dan nyaman bagi peserta.

Meskipun demikian, pelaksanaan P2K2/FDS juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan waktu peserta, rendahnya kehadiran dalam pertemuan, serta perbedaan tingkat pemahaman antar keluarga penerima manfaat. Oleh karena itu, keberhasilan kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh metode penyampaian materi, kemampuan komunikasi pendamping, dan dukungan peserta dalam mengikuti kegiatan secara aktif.

e. Koordinasi dengan Sekolah

Salah satu komponen penting dari Program Keluarga Harapan adalah kerja sama dengan sekolah, khususnya untuk membantu anak-anak dalam keluarga penerima manfaat memenuhi kewajiban pendidikan mereka. Kerja sama ini terjadi antara pendamping sosial, pihak sekolah, dan keluarga penerima manfaat untuk memastikan anak-anak tetap terdaftar, aktif mengikuti pendidikan, dan memenuhi persyaratan kehadiran yang telah ditetapkan. Pemantauan pendidikan anak dapat dilakukan dengan lebih baik jika semua orang bekerja sama.

Penelitian Aji dan Nugroho (2019) menjelaskan Koordinasi dengan sekolah dalam pelaksanaannya mencakup verifikasi data kehadiran siswa, pengawasan perkembangan belajar, dan penyebaran informasi tentang tantangan yang dihadapi siswa selama proses pendidikan. Memberikan data akurat tentang kondisi siswa penerima manfaat sangat penting bagi pihak sekolah. Pendamping sosial dapat menggunakan data ini untuk menilai kepatuhan keluarga terhadap kewajiban pendidikan program. Jadi, koordinasi ini memastikan bantuan yang diberikan benar-benar berdampak pada keberlangsungan pendidikan anak.

Koordinasi yang baik antara pendamping dan pihak sekolah juga dapat membantu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi peserta didik sejak dini, seperti rendahnya kehadiran, kesulitan belajar, atau potensi putus sekolah. Ketika permasalahan terdeteksi lebih awal, pendamping bersama sekolah dan orang tua dapat segera mengambil langkah penanganan yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi tidak hanya berfungsi sebagai administrasi program, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pendidikan anak (Rosdiana dan Atmaja 2023)

Selain itu, koordinasi dengan sekolah juga berperan dalam membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya pendidikan anak. Sekolah dapat memberikan masukan kepada orang tua terkait perkembangan akademik, kedisiplinan, dan perilaku anak di lingkungan belajar. Pendamping sosial kemudian memperkuat informasi tersebut melalui pendekatan kepada keluarga penerima manfaat. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan pendamping menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung keberhasilan belajar anak.

Dapat disimpulkan koordinasi dengan sekolah masih menghadapi beberapa masalah, seperti keterbatasan waktu, komunikasi yang buruk, dan pemahaman yang berbeda tentang bagaimana program dijalankan. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif memerlukan komitmen, komunikasi terbuka, dan kerja sama yang terus menerus antara pendamping, pihak sekolah, dan keluarga penerima manfaat.

2.1.2 Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak

2.1.2.1 Kebutuhan Pendidikan Anak

Kebutuhan pendidikan anak dapat didefinisikan sebagai segala jenis sarana, prasarana, dan dukungan yang dibutuhkan anak agar dapat menyelesaikan proses pembelajaran dengan sebaik mungkin. Kebutuhan ini tidak terbatas pada pendidikan formal tetapi juga mencakup banyak komponen pendukung yang penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan anak, diperlukan stimulasi atau pendidikan. Tidak semua anak sesuai memiliki hak istimewa untuk memenuhi persyaratan akademiknya. Masih banyak anak-anak yang belum tahu apa itu bangku pendidikan. Ini tidak terjadi tanpa alasan. Tidak jarang, status sosial ekonomi keluarga memengaruhi seberapa baik anak mendapatkan pendidikan.

“Pendidikan adalah upaya untuk membantu peserta didik mengembangkan dirinya dalam dimensi intelektual, moral, dan psikologis. Pendidikan sejak awal adalah tugas orang tua dan masyarakat,” Drost (1998; 5). Meskipun demikian, Darkenwald et al (1992; 8) menyatakan “Tujuan pendidikan tidak hanya seharusnya membantu orang belajar lebih banyak tentang dunia, tetapi juga seharusnya

mengajarkan orang tentang keharmonisan kehidupan seseorang dengan keharmonisan kelompok sosialnya” (Nurwati & Listari, 2021)

Setiap hal yang mempengaruhi fisik, akal, dan moral seseorang dari lahir hingga mati disebut pendidikan. Dalam arti ini, pendidikan mencakup semua bentuk pendidikan, baik yang disengaja, seperti pendidikan di rumah atau di sekolah, atau yang tidak disengaja, seperti pendidikan yang berasal dari lingkungan sosial kemasyarakatan, kesehatan, atau alamiah. Dalam hal ini, pendidikan dianggap sama dengan kehidupan itu sendiri, atau dalam arti sesungguhnya segala bentuk hubungan manusia baik dalam keluarga maupun lingkungan alamnya. Kehidupan dianggap sebagai proses pembelajaran dari lahir hingga masa kanak-kanak.

“Need is a condition or situation in which something necessary or desirable is required or wanted” (Morris, 2006; 878). Menurut pengertian tersebut, kebutuhan adalah situasi atau kondisi di mana ada sesuatu yang perlu atau ingin dipenuhi. Suatu hal dianggap perlu, penting, atau harus dipenuhi segera. Burton dan Merrill (1977) menjelaskan bahwa *“need is a discrepancy between what it is and what should be”* Pengertian tersebut menyatakan kebutuhan adalah perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi (Nurwati & Listari, 2021)

Terpenuhinya kebutuhan pendidikan seseorang disebut sebagai pemenuhan kebutuhan pendidikan. Kebutuhan pendidikan mencakup apa yang harus dipelajari untuk meningkatkan diri sendiri dan masyarakat. Semua pendidikan formal, informal, dan non-formal termasuk dalam kategori ini.

2.1.2.2 Peran Keluarga Dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan

Keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam membantu anak belajar. Orang tua juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan membuat lingkungan belajar yang baik untuk mereka. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam kehidupan masyarakat di mana pun juga, dan peranannya sangat penting karena fungsinya yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan masyarakat.

Keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak menunjukkan peningkatan partisipasi dan keberhasilan belajar, menunjukkan bahwa keluarga tidak hanya menyediakan kebutuhan finansial anak tetapi juga berperan sebagai pendukung utama dalam proses pembelajaran anak. Peran keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut:

a. Pemenuhan Kebutuhan Material Pendidikan

Keluarga harus memenuhi kebutuhan dasar anak untuk pendidikan mereka, seperti biaya sekolah, perlengkapan belajar seperti buku, seragam, dan alat tulis, dan cara pergi ke sekolah. Tanpa dukungan materi yang memadai, anak tidak akan dapat mengikuti kelas dengan baik.

b. Dukungan terhadap Proses Belajar Anak

Selain memenuhi kebutuhan materi pendidikan anak, keluarga juga memiliki peran penting dalam mendukung proses belajar anak di rumah. Bentuk dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti membantu anak menyelesaikan tugas sekolah, menyediakan waktu yang cukup untuk belajar, serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Keterlibatan keluarga dalam kegiatan belajar anak tidak hanya membantu meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran, tetapi juga dapat menumbuhkan motivasi dan kedisiplinan belajar. Sejalan dengan hal tersebut, Diana Baumrind (2017) menyatakan bahwa keterlibatan orang tua dalam proses belajar anak memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan akademik maupun sikap belajar anak. Oleh karena itu, peran keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak.

c. Pemberian Motivasi dan Dorongan Belajar

Keluarga juga membantu anak belajar lebih banyak. Sumber motivasi dapat berupa: motivasi untuk berprestasi, penanaman nilai tentang pentingnya pendidikan, penekanan pada kegiatan belajar anak. Orang tua yang memberikan motivasi akan membuat anak memiliki sikap positif terhadap pendidikan dan meningkatkan keinginan mereka untuk belajar.

d. Pengawasan terhadap Pendidikan Anak

Pengawasan pendidikan anak adalah tugas keluarga yaitu: memantau kehadiran dan pergaulan anak di sekolah, mengamati perkembangan hasil belajar. Pengawasan ini sangat penting untuk menjaga anak tetap dalam jalur pendidikan yang baik dan mengurangi risiko putus sekolah.

e. Dukungan Emosional dan Lingkungan yang Kondusif

Keluarga juga bertanggung jawab untuk membuat rumah menjadi tempat yang nyaman dan mendukung bagi anak. Kepercayaan diri anak dalam belajar dapat meningkat dengan dukungan emosional seperti perhatian, kasih sayang, dan komunikasi yang baik. Anak akan lebih fokus selama proses pendidikan jika keluarga memiliki lingkungan yang harmonis.

Perlu dipahami bahwa kemampuan keluarga untuk melakukan peran tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Keluarga yang memiliki masalah keuangan seringkali menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak mereka secara optimal. Dalam situasi seperti ini, intervensi dari pemerintah sangat penting, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan. Program ini membantu keluarga memenuhi kebutuhan pendidikan anak mereka, memungkinkan peran keluarga tetap berjalan meskipun ekonomi mereka terbatas.

2.1.2.3 Faktor Ekonomi dalam Pendidikan Anak

Salah satu komponen penting yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan pendidikan anak adalah faktor ekonomi. Tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan, baik materi maupun non-materi. Akibatnya, tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga sangat penting untuk keberlangsungan akses dan keberlanjutan pendidikan anak.

Faktor ekonomi keluarga, jumlah tanggungan, serta rendahnya tingkat pendidikan orang tua menjadi determinan penting yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Rendahnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendidikan juga berimplikasi pada minimnya dorongan terhadap anak untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Hastuti, Sebho,

dan Lamawuran (2010) yang menunjukkan bahwa keluarga dengan pendapatan rendah memiliki keterbatasan dalam memenuhi hak-hak anak, termasuk pemenuhan kebutuhan pendidikan.

Kebutuhan stimulasi dan pendidikan pada anak merupakan aspek penting dalam mengembangkan potensi serta kemampuan yang dimiliki sejak dini. Pendidikan berperan sebagai sarana untuk mengasah keterampilan kognitif, sosial, maupun emosional anak, sehingga dapat mendukung proses perkembangan secara optimal. Namun demikian, tidak seluruh anak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak. Masih terdapat anak-anak yang belum dapat mengakses pendidikan formal, sehingga hak mereka untuk berkembang secara maksimal belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi tersebut tidak terjadi tanpa adanya faktor penyebab. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah latar belakang sosial ekonomi keluarga. Perbedaan kondisi sosial ekonomi menyebabkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, baik dari segi akses, fasilitas, maupun dukungan yang diberikan oleh keluarga (Yusuf, 2017)

Faktor ekonomi menjadi aspek yang paling dominan dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pendidikan anak. Kemampuan ekonomi keluarga berkaitan langsung dengan penyediaan berbagai kebutuhan pendidikan, seperti biaya sekolah, perlengkapan belajar, serta fasilitas pendukung lainnya. Keterbatasan ekonomi seringkali menjadi hambatan bagi keluarga dalam memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi pendidikan anak. Sejalan dengan hal tersebut, Gary S. Becker (1964) dalam teori modal manusia menjelaskan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi yang memerlukan dukungan sumber daya ekonomi. Dengan demikian, kondisi ekonomi keluarga akan sangat mempengaruhi kemampuan dalam melakukan investasi pendidikan bagi anak. Oleh karena itu, faktor ekonomi memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keberlangsungan dan kualitas pendidikan anak.

2.1.3 Pendidikan Sebagai Investasi Modal Manusia

2.1.3.1 Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam perspektif ekonomi, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai konsumsi, melainkan sebagai investasi yang memberikan manfaat di masa yang akan datang. Konsep ini sejalan dengan teori modal manusia (*human capital theory*) yang dikemukakan oleh Theodore W. Schultz dan dikembangkan oleh Gary S. Becker. Schultz (1961) menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi yang dapat meningkatkan kemampuan dan produktivitas individu, sedangkan Becker (1993) menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan individu di masa depan.

Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Investasi dalam pendidikan memerlukan pengorbanan, baik dalam bentuk biaya, waktu, maupun tenaga. Namun demikian, pengorbanan tersebut diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar di masa depan, seperti peningkatan kesempatan kerja, pendapatan yang lebih tinggi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan sosial dan ekonomi (Becker, 1993).

Pendidikan sebagai investasi masa depan juga memiliki implikasi sosial yang luas. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik, termasuk dalam aspek kesehatan, partisipasi sosial, dan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial secara menyeluruh (Schultz, 1961).

Pendidikan tidak hanya dinikmati tetapi juga diinvestasikan dalam masa depan bangsa. Mempelajari hitung dan membaca sebagai suatu pemerataan dalam situasi terbatas. Untuk menjadi bekal hidup di dunia yang keras dan kompetitif, pendidikan harus berkualitas tinggi. Oleh karena itu, pendidikan harus memiliki jalan yang jelas dan tujuan yang tegas yang mencerminkan ciri-ciri bangsa Indonesia. Dalam keadaan kejelasan tujuan pendidikan akan dapat mempelajari hitung dan membaca sebagai suatu pemerataan dalam situasi terbatas. Untuk menjadi bekal hidup di dunia yang keras dan kompetitif, pendidikan harus

berkualitas tinggi. Oleh karena itu, pendidikan harus memiliki jalan yang jelas dan tujuan yang tegas yang mencerminkan ciri-ciri bangsa Indonesia. Dalam keadaan kejelasan tujuan pendidikan akan dapat membawa siswa ke situasi dimana mereka dapat memaksimalkan potensi mereka yang dia miliki. Pendidik harus berfokus pada semua potensi siswa. Pendidikan tidak hanya dimaksudkan untuk menjadi manusia sebagai alat produksi, seperti yang dipikirkan oleh kapitalis, tetapi juga untuk menguasai teknologi demi kelangsungan kekuasaan. Menurut Mendiknas, "pendidikan tidak hanya menempatkan manusia sebagai alat produksi melainkan pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya" Kompas (2005), dan sebagai alat strategis untuk mengembangkan potensi individu Depdiknas (2006). Oleh karena itu, pendidikan harus terintegrasi secara menyeluruh dan mengimbangi lahir dan batin.

Dalam konteks keluarga, pendidikan anak merupakan bentuk investasi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesadaran orang tua. Keluarga berperan penting dalam menentukan keberlanjutan pendidikan anak melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan serta pemberian dukungan moral dan motivasi belajar. Keluarga yang memiliki pemahaman bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang cenderung lebih berkomitmen dalam mendukung pendidikan anak.

Namun demikian, keterbatasan ekonomi masih menjadi salah satu faktor penghambat dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. Kondisi ini menyebabkan tidak semua keluarga mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya intervensi dari pemerintah melalui program bantuan sosial untuk mendukung akses dan keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu.

Menurut Becker (1993), terdapat tiga aspek utama investasi modal manusia:

a. Investasi Pendidikan (*Education Investment*)

Aspek ini mencakup seluruh proses peningkatan kemampuan intelektual anak melalui kegiatan sekolah maupun kegiatan belajar nonformal. Indikator ini dapat diperluas menjadi:

- 1) Akses anak terhadap layanan pendidikan formal (sekolah, kelas, kurikulum).
- 2) Ketersediaan perlengkapan belajar (seragam, buku, alat tulis).
- 3) Kehadiran dan ketertiban anak dalam mengikuti pembelajaran.
- 4) Dukungan keluarga terhadap aktivitas belajar (bimbingan, motivasi, waktu belajar).
- 5) Kesempatan anak untuk mengembangkan kemampuan akademik maupun literasi dasar.
- 6) Pengurangan hambatan ekonomi yang mengganggu keberlangsungan pendidikan.

b. Investasi Kesehatan (*Health Investment*)

Menurut Becker (1993), kesehatan merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan kualitas modal manusia karena kondisi kesehatan sangat memengaruhi kemampuan anak untuk belajar secara optimal. Anak yang memiliki kondisi kesehatan yang baik cenderung lebih siap mengikuti proses pembelajaran dan mampu menyerap materi pelajaran dengan lebih efektif. Oleh karena itu, kesehatan anak dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu status kesehatan yang mendukung kesiapan belajar, pemenuhan gizi yang cukup serta penerapan pola hidup sehat yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak, akses terhadap layanan kesehatan dasar seperti imunisasi dan pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta menurunnya risiko sakit yang dapat menyebabkan ketidakhadiran di sekolah. Selain itu, lingkungan keluarga yang mendukung perilaku hidup sehat juga menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan anak dan mendukung keberhasilan mereka dalam pendidikan.

c. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan (*Skills and Training Investment*)

Aspek pengembangan keterampilan mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi anak, baik dalam bentuk keterampilan dasar maupun keterampilan lanjutan. Dalam konteks anak usia sekolah, pengembangan keterampilan meliputi kemampuan dasar seperti literasi, numerasi, dan kemampuan sosial yang berperan penting dalam menunjang proses pembelajaran. Selain itu, pengembangan keterampilan dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan belajar

maupun pelatihan nonformal di luar sekolah yang bertujuan meningkatkan kemampuan akademik dan nonakademik anak. Kesempatan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi sarana bagi anak dalam mengembangkan bakat, minat, serta potensi yang dimilikinya. Melalui berbagai kegiatan tersebut, anak diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah (*problem solving*), kreativitas, dan disiplin belajar. Pengembangan keterampilan juga berperan dalam pembentukan karakter serta *soft skills* yang dapat mendukung kesiapan anak dalam menghadapi kehidupan dan masa depan.

Dengan demikian, pendidikan sebagai investasi masa depan merupakan strategi penting dalam meningkatkan kualitas individu dan masyarakat. Investasi pendidikan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, serta memiliki daya saing tinggi di masa yang akan datang.

2.1.3.2 Pendidikan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pendidikan dipandang sebagai alat utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing karena, dari perspektif pembangunan, kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh fisiknya, tetapi juga oleh tingkat pendidikan, keterampilan, dan kemampuan individu untuk beradaptasi terhadap perubahan. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menurut teori modal manusia yang dikemukakan oleh Gary S. Becker (1993) pendidikan merupakan investasi yang dapat meningkatkan produktivitas individu melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan kerja yang lebih baik, sehingga mampu menghasilkan output yang lebih optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja.

Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan dan proses pembelajaran di mana siswa secara aktif mengembangkan potensi diri mereka untuk memiliki kekuatan spiritual dan kemandirian keagamaan. kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk

dirinya, kelompoknya, bangsanya, dan negaranya (UURI No. 20 Th. 2003: 2). Namun, pendidikan secara tidak langsung termasuk latihan.

Sumber daya manusia (SDM) adalah kombinasi kemampuan fisik dan mental seseorang Hasibuan (2007:243). Selanjutnya, daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa lahir (modal dasar), sedangkan kecakapan adalah kemampuan yang diperoleh Hasibuan (2007:243) dari upaya akademik. Daya fisik seseorang didefinisikan sebagai kekuatan dan ketahanan mereka untuk melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas yang diembannya. Dengan demikian, SDM bidang pendidikan adalah kompetensi fungsional yang dimiliki tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya.

Diperlukan program pelatihan dan pendidikan untuk mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang sesuai dengan transformasi sosial karena sumber daya manusia yang berkualitas diperoleh melalui proses. Menurut Tilaar (1998), sumber daya manusia di bidang pendidikan harus memenuhi tiga tuntutan era globalisasi: sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang terus belajar, dan sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai asli. Pengembangan sumber daya manusia dapat membantu mencapai tuntutan ketiga tersebut (Ningrum E 2016).

Sejalan dengan itu, Theodore W (1961). Schultz menegaskan bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kapasitas manusia, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga membentuk pola pikir, sikap, dan karakter individu yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan dunia kerja.

Pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kemampuan individu untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dalam era globalisasi, tuntutan terhadap kualitas sumber daya manusia semakin tinggi, sehingga pendidikan menjadi kunci utama dalam menghadapi persaingan. Individu yang memiliki pendidikan yang memadai akan lebih siap dalam menghadapi perubahan serta mampu memanfaatkan peluang yang ada.

Namun demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan

akses dan pemerataan pendidikan. Keterbatasan ekonomi, fasilitas pendidikan yang belum merata, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan masih menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara optimal.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. Cintyafani D (2024) dalam penelitiannya yang berjudul *Dampak Pemberdayaan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Desa Siraman, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur* menemukan bahwa PKH memberikan kontribusi signifikan dalam membantu keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui pendampingan meningkatkan kesadaran dan kemandirian keluarga penerima manfaat, meskipun masih terdapat kendala berupa keterlambatan penyaluran bantuan dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan.

Senada dengan temuan tersebut, Aulia, D. T. (2024) dalam penelitiannya yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan (Studi Kasus pada Keluarga Penerima Manfaat di Desa Linggawangi, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya)* menekankan bagaimana pemanfaatan bantuan PKH secara langsung berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa dana PKH dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pendidikan, termasuk biaya sekolah, buku, dan perlengkapan belajar, serta mendorong partisipasi orang tua dalam mendukung kegiatan belajar anak di rumah.

Selain itu, penelitian oleh Muliana, L., Mursyidin, & Siregar, M. (2021) mengenai *Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan*

Keluarga di Desa Padang Seurahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa PKH mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemenuhan kebutuhan konsumsi, pendidikan anak, serta meringankan beban ekonomi rumah tangga. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa keterlibatan keluarga dalam memanfaatkan bantuan Program Keluarga Harapan secara optimal berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup anak, termasuk motivasi dan prestasi belajar.

Rusmiyati, C. (2018) dalam penelitiannya berjudul Dampak Program Keluarga Harapan bagi Peningkatan Prestasi Anak (*The Impact of Expected Family Program for the Enhancement of Children Achievement*) menemukan bahwa PKH berperan strategis dalam mendukung capaian akademik anak di keluarga penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi data terkait pemanfaatan bantuan Program Keluarga Harapan untuk pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan tidak hanya membantu pemenuhan biaya pendidikan, seperti uang sekolah, buku, dan perlengkapan belajar, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Intervensi program melalui pendampingan dan monitoring secara berkala terbukti meningkatkan motivasi belajar, kedisiplinan, serta keteraturan anak dalam mengikuti kegiatan sekolah. Kendala yang muncul antara lain variasi pemanfaatan bantuan antar keluarga, keterbatasan kesadaran orang tua dalam mendukung pendidikan anak, serta akses terbatas terhadap fasilitas belajar tambahan.

Berdasarkan berbagai temuan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan memiliki pengaruh signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan anak dan peningkatan prestasi belajar, baik melalui bantuan finansial maupun melalui pendampingan dan pemberdayaan keluarga. Hal ini menunjukkan relevansi Program Keluarga Harapan sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak dan memperkuat kesejahteraan keluarga miskin. Temuan ini menjadi landasan penting bagi penelitian yang berfokus pada pengaruh Program Keluarga Harapan pada

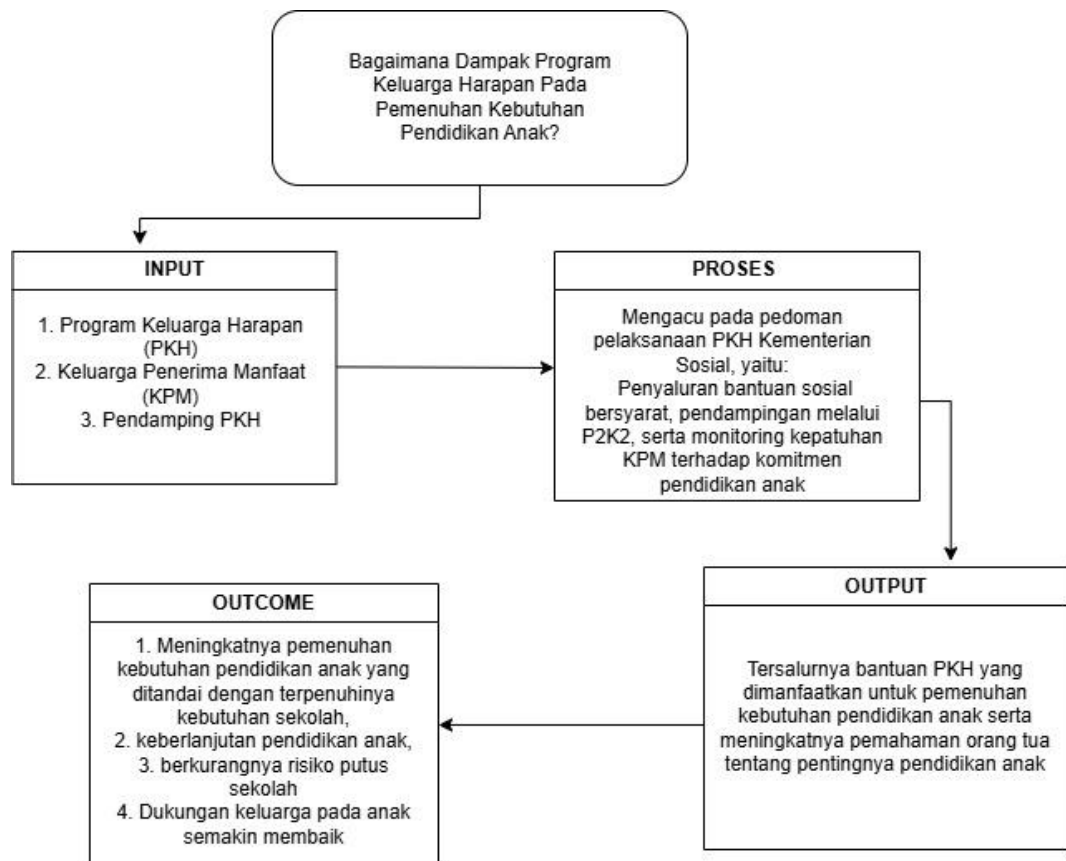
pemenuhan kebutuhan Pendidikan anak di Desa Cilampungilir, khususnya di Kampung Borolong, sehingga dapat memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai dampak program terhadap kualitas pendidikan anak di tingkat lokal.

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Miles dan Huberman (1994), kerangka konseptual adalah suatu konstruksi analitis yang memetakan rangkaian konsep, kategori, dan hubungan antar komponen penelitian sehingga peneliti memiliki gambaran menyeluruh mengenai fokus yang akan dikaji. Mereka menegaskan bahwa kerangka konseptual bukan sekadar skema visual, tetapi merupakan perangkat pemikiran yang membantu peneliti menautkan fenomena empiris dengan landasan teoretis, menegaskan batasan penelitian, serta menyediakan logika hubungan antar variabel atau konsep yang ditelaah. Dengan demikian, kerangka konseptual berfungsi sebagai peta yang menggambarkan bagaimana peneliti memahami struktur masalah, apa saja aspek yang menjadi perhatian, dan bagaimana unsur-unsur tersebut saling berinteraksi dalam konteks penelitian.

Sedangkan Creswell (2014) menyatakan bahwa kerangka konseptual adalah struktur teoretis yang dirancang untuk menjelaskan pola hubungan antara konsep utama penelitian yang diambil dari teori, temuan studi terdahulu, dan konteks empiris yang sedang diteliti. Kerangka ini memberikan dasar rasional bagi peneliti untuk menentukan arah penelitian, menjelaskan mengapa hubungan antar konsep penting untuk diuji, serta memastikan bahwa analisis data dilakukan secara konsisten dengan landasan teoretis yang digunakan. Menurutnya, kerangka konseptual bukan hanya memandu proses analisis, tetapi juga menjadi pijakan dalam menafsirkan temuan sehingga penelitian memiliki koherensi logis mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, hingga penarikan kesimpulan.

Dapat disimpulkan bahwa kerangka konseptual memiliki peran strategis dalam penelitian, yaitu sebagai alat berpikir sistematis yang mengintegrasikan teori, konteks lapangan, dan tujuan penelitian dalam satu konstruksi yang utuh dan logis. Kerangka ini membantu memastikan bahwa penelitian tidak berjalan secara acak, melainkan terarah, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber: Peneliti 2026

Kerangka konseptual ini menggambarkan alur hubungan antara permasalahan penelitian, input, proses, output, dan outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak pada keluarga penerima manfaat. Titik awal kerangka ini berangkat dari permasalahan penelitian mengenai bagaimana dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan anak pada keluarga penerima manfaat.

Pada tahap input, terdapat beberapa komponen utama yang mendukung pelaksanaan program, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk intervensi sosial dari pemerintah, keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai sasaran program, pendamping PKH sebagai pelaksana pendampingan di lapangan, serta bantuan sosial tunai bersyarat yang digunakan untuk mendukung kebutuhan

pendidikan anak. Seluruh komponen tersebut menjadi dasar utama dalam pelaksanaan program di tingkat keluarga.

Input tersebut kemudian dilanjutkan pada tahap proses yang mengacu pada pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial. Proses ini meliputi penyaluran bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat, pemanfaatan bantuan untuk kebutuhan pendidikan anak, pemenuhan komitmen pendidikan seperti kehadiran dan kedisiplinan anak di sekolah, pelaksanaan pendampingan melalui kegiatan P2K2 atau *Family Development Session* (FDS), serta koordinasi antara pendamping PKH, keluarga, dan pihak sekolah. Proses ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan tidak hanya berfokus pada bantuan finansial, tetapi juga pada perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pendidikan anak.

Selanjutnya, dari proses tersebut dihasilkan output yang dapat diamati secara langsung, yaitu tersalurnya bantuan Program Keluarga Harapan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan anak, meningkatnya pemanfaatan bantuan secara tepat sasaran, meningkatnya keterlibatan orang tua dalam mendukung pendidikan anak, serta meningkatnya kepatuhan anak terhadap kewajiban sekolah seperti kehadiran dan kedisiplinan belajar. Output ini menunjukkan adanya perubahan awal yang terjadi sebagai dampak langsung dari pelaksanaan program.

Output tersebut kemudian berkembang menjadi outcome yang bersifat jangka lebih panjang, yaitu meningkatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak pada keluarga penerima manfaat, menurunnya risiko putus sekolah, serta meningkatnya motivasi dan keberlanjutan pendidikan anak. Outcome ini mencerminkan dampak yang lebih luas dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam mendukung akses dan keberlanjutan pendidikan anak.

Dengan demikian, kerangka konseptual ini menjelaskan bahwa dampak Program Keluarga Harapan terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan anak tidak hanya dipengaruhi oleh pemberian bantuan semata, tetapi juga oleh proses pelaksanaan program yang melibatkan berbagai pihak serta perubahan perilaku keluarga penerima manfaat. Hubungan antara input, proses, output, dan outcome

menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan di lapangan serta tingkat kesadaran keluarga dalam mendukung pendidikan anak.